

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ORGANISASI, *PROACTIVE FRAUD* AUDIT, DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA BOS
(Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Kota Ternate)**

Gregorius Jeandry¹, Rena Mustari Mokoginta²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Khairun

gjeandry@gmail.com¹, renamustari@yahoo.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sistem pengendalian internal, budaya organisasi, *proactive fraud* audit, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada sekolah – sekolah penerima dana BOS yang ada di Kota Ternate Populasi sebanyak 819 Guru. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini *random sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan Guru dengan jumlah responden sebanyak 90 orang. Teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linear berganda . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS, budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS, *proactive fraud* audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS, dan *whistleblowing* sistem tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

Kata kunci : Sistem pengendalian internal budaya organisasi, *proactive fraud audit*, *whistleblowing*, dan BOS

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of internal control system, organization culture, proactive fraud audit, and whistleblowing system toward the prevention of fraud in managing the school operating fund. This research used questionnaire instrument. The research was held in the schools receiving the school operating fund in Ternate city. The populations were 819 teacher. The technique of collecting the sample in this research was simple random sampling. The sample used in this research were the headmasters and teacher with the total respondents 90 people. The technique in analyzing the data was analysis of multiple linear regression .The result of this research showed that the internal control system had effect toward the prevention of fraud in managing the school operating fund, the organization culture had effect toward the prevention of fraud in managing the school operating fund, the proactive fraud audit had effect toward the prevention of fraud in managing the school operating fund, and the whistleblowing had no effect toward the prevention of fraud in managing the school operating fund.

Keywords: Internal control system, organization culture, proactive fraud audit, whistleblowing, and school operating fund.

PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menunjang dana pendidikan bagi siswa di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai diterapkan sejak Juli 2005 yang mana merupakan program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didistribusikan ke masing-masing sekolah setiap tiga bulan atau dalam periode triwulan oleh pemerintah. Namun, pada kenyataannya pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan periode yang telah di tentukan oleh pemerintah, karena dalam pendistribusiannya sering terjadi keterlambatan. (Suastawan *et al.*, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 26 Tahun 2017, tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diantaranya untuk mengurangi angka putus sekolah, memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu agar mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah .

Pengelolaan dana BOS selama ini mutlak dalam kendali kepala sekolah yang peranan warga sekolah sangat minim atau bahkan tanpa keterlibatan warga sekolah sama sekali dalam memonitor peruntukan dana BOS tersebut. seperti contohnya peranan orangtua murid, komite sekolah, guru, dan masyarakat sekitar sekolah yang seharusnya turut serta mengawasi bagaimana transparansi dari pihak sekolah untuk kontribusi anggaran dana BOS untuk masing-masing siswa.

Berdasarkan fakta yang terjadi beberapa tahun terakhir masih banyak terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan dana BOS ini. Ada dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 22 miliar tahun 2017 yang dilakukan oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Malut. Dugaan korupsi itu karena dana BOS senilai Rp 22 miliar diduga tidak disalurkan ke sekolah melalui rekening sekolah. (indomalut,2018).

Kasus dugaan penyelewengan dana BOS selanjutnya adalah dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate, LSM Mitra Public Maluku Utara sangat menyesalkan sikap tak terpuji yang diduga melakukan tindakan pidana korupsi atas penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah pada triwulan II 2017 sebesar Rp. 800 juta. Mafia korupsi mulai menjalar ke lembaga pendidikan begitu kuat di Malut, jika ini dibiarkan maka akan berefek pada lambatnya kemajuan pendidikan di Maluku Utara. Padahal pendidikan harus bersih dari virus korupsi karena pendidikan merupakan penopang pendidikan karakter anak bangsa. (MCW News, Ternate, 2017)

Jadi, dari beberapa kasus diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Manfaat BOS dalam penyelenggaraan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu. Masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan oleh serta dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Namun,masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menghancurkan masa depan peserta didik itu sendiri.

Kusumastuti (2012) sistem pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang. Jika pengendalian internal tidak berjalan dengan baik, prosedur tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka akan membuka kesempatan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional organisasi untuk melakukan kecurangan.

Wirakusuma *et.,all* (2017) menunjukkan hasil penelitian Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana BOS apabila ditujukan demi kepentingan bersama serta tidak menguntungkan satu atau dua pihak yang ingin memperoleh keuntungan. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sufiati (2014) menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* atas pengelolaan dana BOS pada SMP/ sederajat se kecamatan Tamalate Kota Makasar. Hasil survey oleh KPMG (1998) dalam Baihaqi Mustafa (2004) menunjukkan, bahwa dari jawaban responden lemahnya pengendalian internal merupakan penyebab tertinggi terjadinya kecurangan (*fraud*).

Contoh permasalahan mengenai lemahnya pengendalian internal adalah masalah yang menimpa pada dunia pendidikan di kota Bandung. Kasus yang menimpa dunia pendidikan kota Bandung adalah mengenai pungutan liar yang terjadi di sekolah-sekolah. Hal ini dinyatakan oleh koordinator GMPP yaitu Harry Santoni bahwa pendidikan di kota Bandung ini bukan hanya faktor kultur, tetapi lemahnya pengawasan bisa menjadi penyebab adanya tindakan pungli di sekolah-sekolah, sehingga seolah ada pembiaran pula dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, menyebabkan tindakan ini merajalela. (Harry Santoni, 2016).

Jadi, dari kasus diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Agar program pencegahan *fraud* ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan sistem pengendalian internal yaitu kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, Kegiatan monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memantau penyaluran dana, kinerja tim manajemen BOS, dll. Sedangkan kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang.

Tuanakotta (2010), Kesadaran tentang adanya *fraud* dapat dimasukkan ke dalam suatu budaya organisasi, dalam hal ini pengertian budaya organisasi itu sendiri merupakan sistem yang dianut oleh para anggota suatu organisasi atau perusahaan yang merupakan hal untuk membedakan organisasi atau perusahaan itu dari organisasi atau perusahaan lain. Dengan demikian, menurut Tuanakotta (2010), budaya organisasi adalah nilai yang dirasakan bersama oleh para anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk sikap perilaku atau komitmen pada organisasi.

Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sekolah bertanggung jawab untuk menerapkan budaya yang baik agar tindakan kecurangan bisa diminimalkan. Budaya organisasi yang baik dalam suatu instansi dipercaya mampu meminimalisir kemungkinan *fraud* untuk terjadi (Suastawan *et al.*, 2017).

Salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan menurut Arens (1991) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Menurut Arens bahwa kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance*.

Hasil penelitian Dwi (2017) pada budaya organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana BOS menghasilkan bahwa Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini berarti Sedangkan Megawati (2018) menghasilkan Budaya Organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada Universitas Swasta di Bandar Lampung.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa agar pencegahan *fraud* berjalan dengan baik maka perlu budaya organisasi yang yang menanamkan kondisi lingkungan pekerjaan integritas yang kuat. Salah satunya tingkat kejujuran yang tinggi.

Selain faktor budaya organisasi, faktor yang akan mengurangi tindakan kecurangan yaitu *proactive fraud audit* salah satu upaya audit untukantisipasi dalam mencegah kecurangan. *Proactive fraud* audit merupakan suatu tindakan preventif dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Menelaah penggunaan disiplin ilmu *Fraud audit* ini digunakan untuk mencegah penyimpangan yang sifatnya dapat merugikan keuangan Negara di lingkungan auditor pemerintah. Oleh karena itu, guna meminimalisir penyelewengan dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pihak pengawas yang berwenang dalam penanganan pengelolaan dana BOS atau seluruh pihak yang berkepentingan dirasa perlu menerapkan *proactive Fraud audit* agar dana BOS ini digunakan sebagaimana mestinya dan kasus penyelewengan dana serupa seperti diatas dapat diminimalisir (Suastawan, et al., 2017).

Proactive fraud audit mengarah pada proses audit yang bersifat *proactive* dimana auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum tindakan audit investigatif dilakukan. *Proactive fraud audit* lebih dikenal sebagai audit terhadap kasus-kasus yang diduga mengandung unsur penyimpangan yang merugikan keuangan Negara atau Kasus-kasus tindak pidana Korupsi. Badjuri (2010) dalam (Ariastini, et al.,2017).

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa *Proactive fraud audit* merupakan suatu tindakan yang baik karena sebelum melakukan investigasi sebaiknya mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Tindakan ini merupakan tindakan yang mampu meminimalisir kecurangan.

Salah satu upaya ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan illegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi atau dikenal dengan upaya *whistleblowing*. sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi *whistleblower* untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi (Suastawan, et al., 2017).

Agustiani et al. (2016). Peran *whistleblower* sangatlah penting dalam mengungkap suatu tindakan melawan hukum di dalam internal organisasi. Namun, banyak orang yang takut untuk mengadukan tindak kecurangan, karena tak sedikit risiko yang harus dihadapi, bahkan sulit dihindari dan solusinya yaitu lebih memilih untuk diam. Mulai dari ancaman terlapor pada dirinya maupun keluarganya dan ancaman pemecatan. Jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* juga sudah ada sejak tahun 2006 dengan lahirnya UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong atau motivasi seseorang untuk menjadi *whistleblower*. Seorang *whistleblower* dalam upaya mengungkap suatu tindak pelanggaran dan kecurangan.

Sistem pelaporan pelanggaran atau yang biasa disebut dengan *whistleblowing system* merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi. Sistem ini bertujuan untuk mengungkap *fraud* yang dapat merugikan instansi dan mencegah *fraud* yang lebih banyak lagi. Penerapan *whistleblowing system* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan penerimaan PAD. (Octaviari ,2015)

Zachrie (2009) menyatakan bahwa *whistleblowing* merupakan cara yang paling efektif di dalam mencegah terjadinya kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ariastini et all (2017) penerapan *whistleblowing system* dikategorikan sangat baik dan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS Se-Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pencegahan *fraud* bahwa *Fraud* tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukannya dan menyembunyikan perbuatan itu. Namun dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* apabila

setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi cepat dan diantisipasi dengan baik salah satu contoh dengan menerapkan *Whistleblowing System*.

Penulis melihat adanya masalah yang perlu dikaji, yaitu peranan dari sistem pengendalian internal, budaya organisasi, *proactive fraud audit*, dan *whistleblowing* dengan sejumlah temuan yang kemungkinan atau dapat diidentifikasi sebagai temuan kecurangan (*fraud*) pada instansi pemerintahan, Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Kota Ternate)**”.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS ?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
3. Apakah *proactive fraud audit* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut

1. Menganalisa pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS.
2. Menganalisa pengaruh Budaya Organisasi terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS.
3. Menganalisa pengaruh *Proactive Fraud Audit* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS.
4. Menganalisa pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

KERANGKA TEORITIK

Landasan Teori

Fraud Triangle

Salah satu penjelasan teoritis mengenai tindakan kecurangan disampaikan oleh Cressey (1953) dalam Sukirman dan Sari (2013). Menurutnya, seseorang bisa melakukan tindakan kecurangan apabila dilandasi oleh tiga hal yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiganya saling mendukung sama lain dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*).

1. **Pertama**, Tekanan yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Tekanan ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu nyata (*direct*) dan persepsi (*indirect*). Tekanan nyata disebabkan oleh kondisi faktual yang dimiliki oleh pelaku seperti orang sering gambling atau menghadapi persoalan-persoalan pribadi, sedangkan tekanan karena persepsi merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti misalnya *executive need*.
2. **Kedua**, Kesempatan yaitu **peluang** yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh kontrol yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah dalam hal kontrol. Kontrol yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan.
3. **Ketiga**, Rasionalisasi yaitu sikap yang ditunjukkan oleh pelaku dengan melakukan justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini merujuk pada sikap, karakter atau sistem nilai yang dianut oleh pelakunya. Rasionalisasi mengacu pada fraud yang bersifat

situasional. Pelaku akan mengatakan: *"I'm only borrowing they money; I'll pay it back"*, *"Everyone does it"*, *"I'm not hurting anyone"*, *"It's for a good purpose"*, dan *"It's not that serious"*. Sikap dan perilaku rasionalisasi bisa juga akan melahirkan perilaku serakah.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Antara Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS

Konsep segitiga *fraud* (*Fraud Triangle*) memiliki 3 standar audit yang terdiri dari tekanan, kesempatan atau peluang, dan rasionalisasi. Dalam sistem pengendalian internal, menggunakan standar audit yang kedua yaitu kesempatan atau peluang. Karena diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat. Untuk itu sikap transparansi serta akuntabel berperan sangat penting untuk dapat meminimalisir tingkat kecurangan ataupun penyimpangan sehingga dapat memberikan informasi akurat dan sesuai dengan prosedur yang dijalankan. Jika sistem pengendalian lemah, peluang terjadinya *fraud* akan lebih banyak.

Sistem pengendalian internal pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sari (2013) berpendapat konsep pelaksanaan pengendalian intern diharapkan dapat menghilangkan praktek-praktek korupsi karena proses pemerintahan akan dilakukan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkala. Penerapan peraturan pemerintah ini di lingkungan pemerintahan merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Irawan (2016) Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

Hubungan Antara Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS

Menurut Sutrisno (2013), budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan, asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya.

Dalam penerapan budaya organisasi, konsep segitiga *fraud* yang digunakan yaitu rasionalisasi yang merupakan sikap yang ditunjukkan oleh pelaku dengan melakukan justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini merujuk pada sikap, karakter atau sistem nilai yang dianut oleh pelakunya.

Salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan menurut Arens (2008:441) dalam Zelmianti dan Anita (2015) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Teori Arens menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar suatu kecurangan terjadi ketika lingkungan pekerjaan integritasnya lemah, pengendaliannya tidak kuat, kehilangan akuntabilitas, atau mendapat tekanan yang besar, maka tidak dapat dipungkiri seseorang akan melakukan ketidakjujuran. Berdasarkan penelitian yang di dapat salah satu contoh bentuk penerapan budaya organisasi agar memiliki nilai atau sikap maupun karakter menjadi lebih baik, perintah dari walikota ternate Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M menerapkan setiap hari jumat Sekolah Dasar Se-kota Ternate

diwajibkan menggunakan pakaian muslim kecuali untuk yang non-muslim dengan mengusung tema “Jumat Bersholawat”. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif signifikan antara budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS. Sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Budaya Organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana BOS

Hubungan Antara *Proactive Fraud Audit* terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS

Konsep yang digunakan dalam segitiga *fraud* yaitu kesempatan atau peluang. Karena diperlukan *proactive fraud audit* yang kuat untuk itu sikap transparansi serta akuntabel berperan sangat penting untuk dapat meminimalisir tingkat kecurangan ataupun penyimpangan sehingga dapat mengumpulkan serta memberikan informasi lebih akurat dan sesuai dengan prosedur yang dijalankan. Jika *proactive fraud audit* lemah peluang terjadinya *fraud* akan lebih banyak.

Minimnya upaya audit sebagai tindakan preventif guna mencegah terjadi kecurangan dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kecurangan atau (*fraud*) masih marak terjadi. Audit yang mampu melacak rekam jejak suatu instansi atau perusahaan dalam pengelolaan dana yang ada dapat menunjukkan sedini mungkin apabila ada kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermiyetti pada tahun 2008 menunjukkan jika variabel lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan merupakan pengendalian internal dalam rumah sakit yang mempunyai peranan sangat penting dalam hal mencegah kecurangan (*Fraud*). Maka hal tersebut dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. Sehingga hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H3: *Proactive Fraud Audit* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada pengelolaan dana BOS.

Hubungan Antara *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS

Konsep yang digunakan dalam segitiga *fraud* yaitu tekanan. Suatu tindakan insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi atau dikenal dengan upaya *whistleblowing*. sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi *whistleblower* untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ariastini *et al.*, (2017) dan Agustiani (2016) menyatakan bahwa penerapan *whistleblowing system* dikategorikan sangat baik dan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BOS pada sekolah-sekolah. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sekolah – sekolah penerima dana BOS yang ada di Kota Ternate. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November Tahun 2018.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek dari penelitian yang berguna sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan pada sekolah dasar wilayah ternate. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Guru yang ada di wilayah ternate yang berjumlah 819 orang dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik *slovin* menurut Sugiyono (2013) dalam Dewi *et. al* (2017).

Metode penarikan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* dengan menggunakan rumus *slovin*. Sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 90 responden. Responden dalam penelitian adalah Kepala Sekolah dan Guru. *Simple random sampling* adalah suatu tipe sampling probabilitas, di mana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Husain (2009:42), dalam Wulandari (2017) data primer adalah yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan akan dianalisis menggunakan bantuan program SPSS. Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan tertutup (kuisisioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden.

Penelitian ini menggunakan rumus *slovin* karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus *representative*.

Model dan Analisis Data

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang dihitung dengan menggunakan program SPSS. Yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, *Proactive Fraud Audit*, dan *Whistleblowing System* terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana BOS. Adapun persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$PFraud = \beta_0 + \beta_1 SPI + \beta_2 BO + \beta_3 PFA + \beta_4 WS + e$$

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan dana BOS. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal, budaya organisasi, *proactive fraud audit*, dan *whistleblowing system*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini dilakukan pada sekolah dasar penerima dana BOS yang ada di Kota Ternate. Dalam penelitian ini, jumlah sekolah dasar yang ada di Ternate sebanyak 106 sekolah dan menjadi objek penelitiannya berjumlah 45 sekolah. Kemudian yang menjadi sampelnya berjumlah 90 responden.

Tabel 1. Data Responden

	Jumlah	Prese ntase
Jabatan di Sekolah		
Kepala Sekolah	45 orang	50%
Guru	45 orang	50%

Sumber: data primer yang diolah (2018)

Hasil Uji Hipotesis

Untuk mengetahui hubungan antara variabel Sistem Pengendalian Internal (X1), Budaya Organisasi (X2), *Proactive Fraud Audit* (X3), *Whistleblowing System* (X4), dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y). Dari uji analisis dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 2. Hasil Uji Persamaan

Variabel Dependen	Variabel independen	Kofisien regresi	T Hitung	Sig
PF	SPI	0,213	2,464	0,016
	BO	0,323	3,909	0,000
	PFA	0,278	0,973	0,000
	WS	0,061	3,675	0,501
Konstanta	-0,180			
R	0,742			
R Square	0,551			
Adjust. R Square	0,530			
F Hitung	26,072			
Sig. F	0,000			
N	90			

Sumber: data primer yang diolah spss (2018)

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,180 + 0,213 + 0,323 + 0,278 + 0,061 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi Tabel 4.9 maka dapat diinterpretasikan beberapa hal, antara lain:

1. Nilai konstanta (α) adalah -0,180. Artinya, jika Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, *Proactive Fraud Audit*, dan *Whistleblowing System* adalah 0, maka Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) adalah negatif senilai -0,180.
2. Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,213. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 1 Satuan, maka Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) akan mengalami peningkatan sebesar 0,213 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9, diperoleh koefisien regresi untuk variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,213 dan nilai t hitung sebesar 2,464 dengan signifikansi sebesar 0,016 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS. Dengan demikian H_1 diterima.
3. Variabel Budaya Organisasi memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,323. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan variabel Budaya Organisasi sebesar 1 Satuan, maka Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) akan mengalami peningkatan sebesar 0,323 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9, diperoleh koefisien regresi untuk variabel Budaya Organisasi sebesar 0,323 dan nilai t hitung sebesar 3,909 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS. Dengan demikian H_2 diterima.
4. Variabel *Proactive Fraud Audit* memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,278. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan variabel *Proactive Fraud Audit* sebesar 1 Satuan, maka Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) akan mengalami peningkatan sebesar 0,278 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9, diperoleh koefisien regresi untuk variabel *Proactive Fraud Audit* sebesar 0,278 dan nilai t hitung sebesar 3,973 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi

(α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa *Proactive Fraud Audit* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS. Dengan demikian H_3 diterima.

5. Variabel *Whistleblowing System* memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,061. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan variabel *Whistleblowing System* sebesar 1 Satuan, maka Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) akan mengalami peningkatan sebesar 0,061 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9, diperoleh koefisien regresi untuk variabel *Whistleblowing System* sebesar 0,061 dan nilai t hitung sebesar 0,675 dengan signifikansi sebesar 0,510 yang nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α)=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS. Dengan demikian H_4 ditolak

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Menurut konsep segitiga *fraud (fraud triangle)* memiliki 3 standar audit yang terdiri dari tekanan, kesempatan atau peluang, dan rasionalisasi. Dalam sistem pengendalian internal, menggunakan standar audit yang kedua yaitu kesempatan atau peluang. Karena diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat. Untuk itu sikap transparansi serta akuntabel berperan sangat penting untuk dapat meminimalisir tingkat kecurangan ataupun penyimpangan sehingga dapat memberikan informasi akurat dan sesuai dengan prosedur yang dijalankan. Jika sistem pengendalian lemah, peluang terjadinya *fraud* akan lebih banyak.

Sari (2013) berpendapat konsep pelaksanaan pengendalian intern diharapkan dapat menghilangkan praktek-praktek korupsi karena proses pemerintahan akan dilakukan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkala. Penerapan peraturan pemerintah ini di lingkungan pemerintahan merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurut Kusumastuti (2012) sistem pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen. Jika pengendalian internal tidak berjalan dengan baik, prosedur tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka akan membuka kesempatan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional organisasi untuk melakukan kecurangan. Hal ini berarti semakin tinggi upaya penerapan sistem pengendalian internal (SPI) maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariastini *et al.*, (2017) dan Irawan (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, budaya yang diterapkan dalam sebuah organisasi dapat menjamin tercegahnya tindak kecurangan. Budaya yang diterapkan harus sejalan dengan tujuan organisasi.

Penerapan budaya organisasi dalam konsep segitiga *fraud* yang digunakan yaitu rasionalisasi yang merupakan sikap yang ditunjukkan oleh pelaku dengan melakukan justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini merujuk pada sikap, karakter atau sistem nilai yang dianut oleh pelakunya. Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan menurut Arens (1991) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi.

Budaya organisasi yang baik sangat penting dalam mencegah tindakan kecurangan. Tindakan pencegahan dapat diterapkan melalui budaya kerja yang dikembangkan dengan baik akan menghasilkan nilai-nilai fundamental organisasi yang baik, seperti menunjang tinggi kejujuran dan integritas penghargaan dan kualitas kerja serta pelayanan yang prima dan penghormatan atas keterbukaan dan transparansi (Wulandari, 2017). Dengan demikian, semakin baik budaya organisasi maka semakin meningkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah-sekolah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian wulandari (2017), serta Zelmianti dan Anita (2015) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan.

Pengaruh *Proactive Fraud Audit* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *proactive fraud audit* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *proactive fraud audit* maka pencegahan terhadap *fraud* dapat dilakukan dengan baik pula.

Konsep yang digunakan dalam segitiga *fraud* yaitu tekanan. Suatu tindakan insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Suastawan *et al.*, (2017), *proactive fraud audit* mengarah pada proses audit yang bersifat *proactive* dimana auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan.

Proactive fraud audit salah satu faktor yang dipercaya mampu meningkatkan pencegahan kecurangan dalam suatu instansi atau perusahaan dalam hal ini adalah sekolah-sekolah penerima dana BOS dengan melakukan kegiatan audit secara preventif dapat mendeteksi *fraud* sedini mungkin. Minimnya upaya audit sebagai tindakan preventif guna mencegah terjadi kecurangan dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kecurangan atau (*fraud*) masih marak terjadi. Audit yang mampu melacak rekam jejak suatu instansi atau perusahaan dalam pengelolaan dana yang ada dapat menunjukkan sedini mungkin apabila ada kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan. Hal ini berarti *proactive fraud audit* yang tinggi dapat meningkatkan terjadinya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah-sekolah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suastawan *et al.*, (2017) dan Ariastini *et al.*, (2017) yang menunjukkan bahwa *proactive fraud audit* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS.

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* bukan merupakan tolak ukur dalam tindak pencegahan *fraud*.

Konsep yang digunakan dalam segitiga *fraud* yaitu tekanan. Suatu tindakan insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Salah satu upaya yang dapat mencegah

terjadinya kecurangan adalah dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi atau dikenal dengan upaya *whistleblowing*. Sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi *whistleblower* untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi. Namun kenyataannya, *whistleblowing system* tidak akan berhasil jika hanya dibuat aturan dan tidak dipraktikkan.

Terlihat jelas di lapangan bahwa tidak semua sekolah menerapkan *whistleblowing system*. Sekolah yang dijadikan sebagai objek penelitian ini belum sepenuhnya mendukung untuk diterapkannya *whistleblowing system*, karena tidak terbukti dapat mencegah fraud. Menurut KNKG (2008), *whistleblowing system* minimal harus terdiri dari tiga aspek yaitu aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan. Namun, pada hasil penelitian ini, masih ada responden yang menjawab tidak tahu. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua responden paham akan ketiga aspek tersebut yang kemudian tidak dapat memengaruhi mereka untuk melakukan tindakan fraud dan jarang melaporkan tindakan *fraud* yang terjadi jika mereka mengetahuinya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015) yang menunjukkan bahwa persepsi karyawan mengenai *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* melalui perilaku etis.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS. Hal ini menunjukkan, sistem pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).
2. Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS. Hal ini menunjukkan, budaya yang diterapkan dalam sebuah organisasi dapat menjamin tercegahnya tindak kecurangan.
3. *Proactive Fraud Audit* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS. Hal ini menunjukkan, semakin baik *proactive fraud audit* maka pencegahan terhadap *fraud* dapat dilakukan dengan baik pula.
4. *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS. Hal ini menunjukkan, penerapan *whistleblowing system* bukan merupakan tolak ukur dalam tindak pencegahan *fraud*.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian ini:

1. Penelitian mendatang sebaiknya menambah menambahkan dimensi yang ada dalam masing- masing konstruk kuesioner sehingga pengujian terhadap konstruk tersebut dapat dilakukan secara mendetail. Hal tersebut akan menambah jelas hasil penelitian selanjutnya.
2. Menggunakan variabel lain atau menambahkan variabel independen yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BOS.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan dan menambah jumlah sampel yang diteliti sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat analisis yang lebih akurat.

4. Untuk sekolah-sekolah agar dapat meningkatkan partisipasi dalam melibatkan pegawainya (guru-guru) yang memahami dan berpengalaman dalam proses tindak pencegahan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, Ni Kadek Siska., Edy Sujana, dan Made Arie Wahyuni. 2016. Pengaruh *Whistleblowing System* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 6 No: 3 Tahun 2016*.
- Ariastini, Ni Kadek Dwi., Gede Adi Yuniarta dan Putu Sukma Kurniawan. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Proactive Fraud Audit*, Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Dana Bos Se-Kabupaten Klungkung. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 8 No: 2 Tahun 2017*.
- Arens, A. Alvin dan James K.Loebbecke.1991. *Auditing. Suatu Pendekatan Terpadu*, edisi ketiga.Jakarta:Erlangga.
- Bagja, Hari . 2016. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Bpkad Kota Bandung (Studi Kasus Pada Pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung) . Skripsi.Universitas Komputer Indonesia
- BPKP, 2008. *Fraud Auditing*. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Diklat Penjenjangan Auditor Ketua Tim. Edisi Kelima.
- Bppk.kemenkeu.go.id (diakses :17 September 2018)
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati, 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : ANDI
- Harry Santoni . 2016. <http://jabar.tribunnews.com> (diakses : 12 September 2018)
- Harris, Charle E., Michael S Pritchart, dan Michael J Rabins. 2008. *Engineering Ethics and Concepts Cases. Fourth Edition*.
- Hermiyetti.2010.Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang. STEKPI Jakarta.
- Irawan, Suryo. 2016.Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Pada Sekolah Dasar (Sd) di Kecamatan Andir Kota Bandung. Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Indomalut.com (diakses: 25 Oktober 2018)
- Jensen, Michael C dan William H Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. University of Rochester.
- Kadek Yuli Kurnia Dewi dan Ni Made Dwi Ratnadi. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *e-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18.2. Februari Tahun 2017.
- Komite Nasional Kebijakan Governance .2008. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - Spp(Whistleblowing System – Wbs)*.
- Kompas.com (diakses: 17 September 2018)
- Kusumastuti, 2012. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. Skripsi . Universitas Diponegoro.
- MCW News, Ternate, 2017 (diakses: 25Oktober 2018)
- Miceli, Marcia., Janet Pollex Near P, dan Terry M. Dworkin. 2008. *Whistle-Blowing in Organizations*.
- Muhammad Khoiril Anwar. 2015. <http://news.detik.com> (diakses: 12 September 2018)

- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 2010. *Auditing*. Buku dua, edisi kelima Jakarta: Salemba Empat.
- Octaviari, Nugroho Vredy. 2015. *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai WhistleBlowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening Pada PT Pagilaran*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta .
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pratiwi, Arika Hanna. 2015. Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan *Internal Fraud* Studi Kasus Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *e-Journal*. Universitas Bakrie Vol 4, No 01 Tahun 2015.
- Radarcirebon.com (diakses: 13 September 2018)
- Samho, Bartolomeus dan Oscar Yasunari, 2010. Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Tantangan - Tantangan Implementasinya Di Indonesia Dewasa Ini. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. *e-Journal*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Sari, Diana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Universitas Widyatama Bandung.
- Suastawan, Made Indra Dwi Putra., Edy Sujana, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2017. Pengaruh Budaya Organisasi, *Proactive Fraud Audit*, Dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah Di Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 7 No: 1 Tahun 2017*.
- Sufiati, Rahman Pura. 2014. Implikasi Penerapan *Internal Control* Terhadap Pencegahan *Fraud* Atas Pengelolaan Dana BOS. *E-Journal* Vol: 4, No 2 Tahun 2014.
- Sukirman dan Maylia Pramono Sari. 2013. Model Deteksi Kecurangan Berbasis *Fraud Triangle* Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing..e-Journal*. Universitas Negeri Semarang *Volume 9/No. 2/MEI 2013 : 199 – 225*.
- Susilawati dan Rr Anggun Kartika Dewi. 2018. Budaya Organisasi, Efektivitas Pengendalian Internal dan *Fraud*. *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*.
- Theodorus M. Tuanakota, 2010, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Salemba Empat (T)
- Tribun-Bali.Com, Denpasar. (diakses: 13 September 2018)
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Teori Keagenan (Agency Theory). (diakses: 12 September 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesianomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wardana, Gede Adi Kusuma., Edy Sujana, dan Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 8 No: 2 Tahun 2017*.
- Wulandari, Trisna. 2017. Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan. Skripsi. Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Zelmiyanti, Riri dan Lili Anita. 2015. Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel *Intervening*. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Vol. 8, November 2015, 67-76.